

# POTENSI PEMBANGUNAN MASYARAKAT PESISIR SELATAN DIY MASALAH DAN TANTANGANNYA

Imamudin Yuliadi

*Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*

*imamudin2006@yahoo.co.id*

## Abstract

*Indonesia is one country that have longest coast in the world because Indonesia consist of many archipelago. This fact give implication that economic is potential factors for people life at the coastal areas to economic growth for improving walfare and equity on economic development both national and regional scope. The role of fisherman is very strategic to improve economic growth, even that their condition is below average economic welfare. Source of data from government office like statistical center agency, Bank Indonesia and many else. Research methodology that applied is desriptive investigative to obtain the fact about the economic problem of people at the coastal region for improving people economic welfare. Analitical methode at this research is location quation (LQ), shift-share, and typology of klassen. The output of this research is making the planning model of promotion system and integrated investment to realize the equility of economic development at southern coastal part of DIY.*

**Keywords:** People Empowerment Model, Integrated Investment, Beach Area

## Abstrak

*Realitas menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang mempunyai wilayah pesisir paling panjang di dunia. Fakta ini membawa implikasi bahwa potensi ekonomi masyarakat wilayah pesisir pantai merupakan faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan baik dalam skala nasional maupun regional. Peranan nelayan sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun kenyataannya kondisi nelayan rata-rata masih memprihatinkan kondisi kesejahteraannya. Sumber data diambil dari kantor pemerintah seperti BPS, Bank Indonesia, dsb. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian deskriptif investigatif untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan pembangunan ekonomi masyarakat pesisir khususnya menyangkut potensi ekonomi daerah pesisir pantai untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Metode analisis data yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode yaitu metode Loqation Quotion (LQ), analisis SWOT, analisis Trend, analisis Shift-Share, Analisis Typology Klassen. Hasil dari penelitian ini untuk membuat model perencanaan dan sistem promosi serta investasi terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat kawasan pesisir selatan propinsi DIY*

**Kata Kunci:** Model Pemberdayaan masyarakat, Investasi terpadu, wilayah pantai

## Pendahuluan

Pembangunan merupakan proses yang melibatkan banyak faktor baik ekonomi maupun non ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pembangunan wilayah mencakup dimensi tata ruang, tata kelola pemerintahan, tata kelola kehidupan masyarakat dan tata kelola lingkungan sehingga mencapai keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam perspektif Islam telah ditegaskan betapa pentingnya upaya untuk selalu meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam dimensi fisik maupun non fisik seperti mental, spiritual, emosional dan sosial. Manusia sebagai pengemban risalah Illahi mempunyai peran dan tanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam untuk tercapainya misi kehidupan (*Chapra, 2000*).

Indonesia sebagai negara maritim memiliki cakupan wilayah yang cukup luas demikian juga implikasinya mempunyai pantai terpanjang di dunia. Sehingga hal yang wajar manakala pemerintah memberikan prioritas pada upaya untuk meningkatkan pembangunan wilayah pantai. Pembangunan di kawasan pesisir pantai memerlukan penanganan yang berbeda di dibandingkan dengan kawasan lainnya mengingat kawasan pesisir pantai memiliki kekhasan baik ditinjau dari aspek geografi, geomorfologi, antropologi, ekonomi dan sosial. Perubahan kondisi alam yang relatif lebih ekstrim dibandingkan kawasan darat mendorong masyarakat melakukan aktivitas ekonomi dengan tingkat resiko yang lebih besar dengan kemungkinan mengalami kerugian yang juga lebih besar. Perlu ada kerjasama sinergis antara masyarakat setempat dengan instansi pemerintah yang terkait untuk menyelesaikan persoalan pembangunan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir pantai (*Faisal Basri, 2013*).

Wilayah pesisir selatan propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang menyimpan potensi alam cukup besar untuk menopang pembangunan daerah dan peningkatan ketahanan pangan bagi masyarakat setempat dan daerah lainnya. Isu ini menjadi semakin menonjol sejak ada rencana pemerintah untuk membangun bandara bertaraf internasional di daerah Congot, kabupaten Kulonprogo, propinsi DIY. Diharapkan realisasi dari

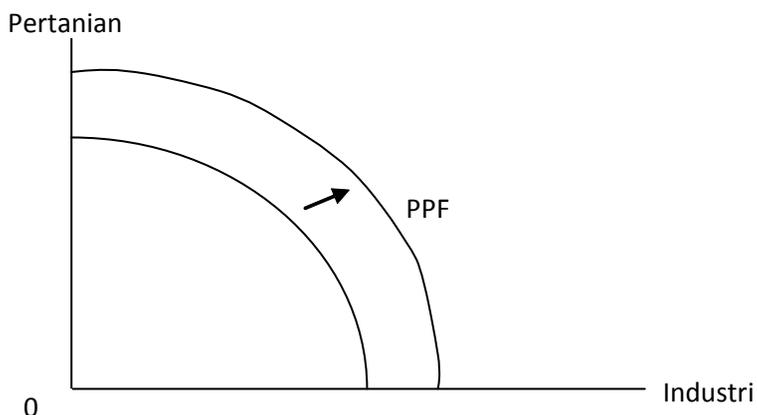
rencana pembangunan tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah atas dengan tumpuan modal yang besar tapi juga bisa dirasakan oleh masyarakat lapisan bawah secara lebih merata.

Strategi dan pengembangan ekonomi terpadu daerah pesisir DIY adalah suatu bentuk alternatif model pengembangan ekonomi dalam menjawab tantangan untuk melaksanakan pembangunan perekonomian dan pengembangan daerah/wilayah secara terpadu dan komprehensif, melalui pendekatan pengembangan potensi wilayah pesisir selatan DIY secara terpadu. Nelayan di DIY relatif jumlahnya tidak terlalu banyak namun memberikan kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan taraf kesejahteraan nelayan dan juga dalam pemenuhan kebutuhan hasil tangkapan laut bagi masyarakat DIY dan sekitarnya. Nelayan DIY berdomisili di wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah pantai laut Hindia yaitu di kabupaten Bantul, kabupaten Kulonprogo dan kabupaten Gunungkidul. Sebagian besar kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pesisir di samping melaut juga dengan melakukan kegiatan pengolahan hasil tangkapan ikan serta kegiatan sampingan lainnya seperti mengolah lahan pertanian.

### **Pembangunan Ekonomi dan Wilayah**

Kajian tentang pembangunan ekonomi dan wilayah telah banyak dilakukan para ahli dan demikian juga jurnal dan buku-buku teks tentang ekonomi pembangun telah mengkaji tentang permasalahan pembangunan ekonomi dan wilayah. Pembangunan pada dasarnya adalah upaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu. Diskursus mengenai aspek-aspek pembangunan ekonomi telah mengalami perkembangan cukup pesat seiring dengan dinamika kehidupan manusia itu sendiri. Kontribusi ekonom klasik yaitu Adam Smith dengan karyanya *The Wealth of Nations*, menjadi tonggak dari intensifnya kajian tentang ekonomi termasuk pembangunan ekonomi, meskipun sesungguhnya beberapa abad sebelumnya telah banyak para ahli ekonomi dari kalangan muslim yang mulai menggali mengenai masalah pembangunan ekonomi seperti *Abu Yusuf, Ibn Khaldun, Ibn Taymiyah* dsb. (Siddiqi, 1976).

Pembangunan ekonomi bisa digambarkan melalui pergeseran kurva PPF ke kanan artinya kapasitas perekonomian semakin meningkat sehingga kemampuan memenuhi kebutuhan bagi masyarakat semakin meningkat. Dalam teori ekonomi kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa digambarkan dalam suatu kurva PPF (*Production Possibility Frontier*) seperti dalam gambar berikut :



Gambar 1. Kurva *Production Possibility Frontier*

Sumbu horisontal menunjukkan kemampuan memproduksi barang-barang industri sedangkan sumbu vertikal menunjukkan kemampuan memproduksi barang-barang pertanian. Kurva PPF menunjukkan kemampuan maksimal perekonomian dalam memproduksi berbagai kombinasi barang-barang industri dan pertanian dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Semakin besar PPF berarti semakin tinggi kemampuan tingkat produksinya dan semakin besar kekayaan negara tersebut. Dengan kemajuan teknologi kurva PPF dapat digeser ke kanan sehingga kapasitas produksinya menjadi semakin besar dan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat bertambah baik (*Gordon, 1993*).

Kajian tentang masalah pembangunan ekonomi berarti membahas persoalan negara-negara berkembang yang memiliki kompleksitas persoalan yang cukup beragam. Menurut Meier dan Baldwin bahwa ada beberapa sifat dari negara-negara berkembang yang perlu dicermati dalam upaya untuk mengembangkan proses

pembangunan ekonomi yaitu :

1. Merupakan produsen barang-barang primer
2. Persoalan tekanan penduduk karena pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dan tingginya tingkat pengangguran
3. Sumberdaya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal
4. Kualitas sumberdaya manusia yang masih terbelakang karena rendahnya kualitas pendidikan dan ketrampilan
5. Kekurangan jumlah modal untuk menggerakkan pembangunan ekonomi
6. Orientasi perdagangan luar negeri dengan mengandalkan ekspor barang-barang primer.

Sedangkan *Todaro* menyatakan bahwa persoalan pembangunan ekonomi di negara berkembang merupakan persoalan yang cukup serius karena menyangkut peningkatan kualitas kehidupan manusia. *Todaro* mengemukakan ada beberapa karakteristik dari negara berkembang yaitu (*Todaro, 2000*):

1. Tingkat kehidupan yang rendah yang disebabkan karena rendahnya pendapatan per kapita.
2. Tingkat produktivitas tenaga kerja yang rendah karena rendahnya kualitas pendidikan dan pelatihan.
3. Tingkat pertumbuhan penduduk dan beban tanggungan yang tinggi
4. Tingginya tingkat perkembangan pengangguran dan pengangguran semu
5. Ketergantungan terhadap produksi pertanian dan ekspor produk primer
6. Kekuasaan, ketergantungan dan vulnerabiliti dalam hubungan-hubungan internasional

### **Ekonomi Pembangunan Islam**

Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi Islam secara jelas telah menyatakan pentingnya suatu masyarakat, bangsa dan negara untuk melakukan perencanaan pembangunan secara cermat dan

berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya melalui program pembangunan yang terarah. Allah swt menciptakan manusia di muka bumi untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan memakmurkan kehidupan melalui kreativitas dan karya nyata di berbagai sektor kehidupan.

Dalam suatu hadist Qudtsi Allah swt menyatakan bahwa Allah lebih menyukai hambanya yang kuat daripada yang lemah. Pengertian kuat diartikan dalam perspektif yang luas yaitu kuat secara fisik maupun psikis untuk mengemban amanah sebagai *khalifah Allah* di muka bumi sehingga membutuhkan kemampuan (*capability*) dan karakter kemanusiaan yang baik agar dapat memainkan peran dan tanggung jawabnya secara optimal. Melalui pembangunan di segala bidang secara berkesinambungan dan seimbang akan mendorong peningkatan kualitas hidup manusia (*Khursid Ahmad, 1976*).

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi Islam memiliki satu pandangan yang khas mengenai kehidupan di dunia ini. Pandangan Islam tentang kehidupan menyangkut tiga aspek yaitu *tawhid* (keesaan Tuhan), *khalifah* (kekhilafahan manusia) dan *'adalah* (keadilan). *Tawhid* mengandung arti bahwa kejadian alam semesta dan manusia merupakan bukti secara maujud tentang keesaan Allah SWT. Kehidupan alam semesta berjalan secara teratur dan harmonis mengindikasikan bahwa Zat yang mengaturnya bersifat Esa baik dalam tindakan, sifat dan zatnya. Prinsip ini membawa konsekuensi bahwa manusia dituntut untuk menggunakan semua potensi yang diberikan untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengabdian kepada Allah SWT merupakan bentuk dari fungsi dan peranan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan kehidupan baik secara material maupun spiritual. Fungsi dan peranan manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini untuk mengembangkan aspek keadilan sebagai ujud ibadah kepada Allah SWT. Dalam konteks pembangunan ekonomi bahwa tujuan dari pembangunan tidak hanya semata terpenuhinya kebutuhan fisik saja namun juga untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertaqwa. Unsur-unsur penting dalam menyusun strategi pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam meliputi (*Hasanuzzaman, 1981*):

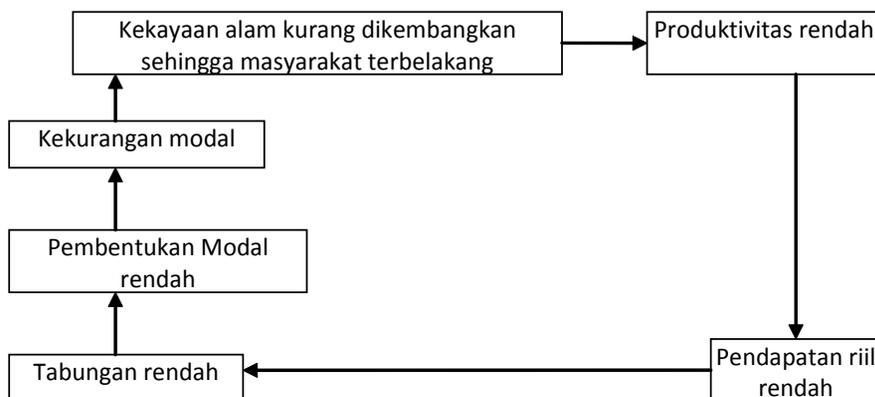
1. Perlunya pengendalian terhadap permintaan secara berlebihan
2. Perlunya mengembangkan aspek motivasi manusia
3. Mengembangkan kerangka sosial ekonomi sebagai unsur penunjang dalam pembangunan
4. Pentingnya peranan negara dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat.

*M. Umer Chapra* menyatakan ada lima langkah utama dalam proses pembangunan ekonomi suatu negara yaitu (*Chapra, 2000*):

1. Meningkatkan kualitas Sumberdaya manusia
2. Mencegah akumulasi kekayaan pada sekelompok masyarakat
3. Penyusunan sistem dan kerangka dasar pembangunan
4. Penyusunan sistem keuangan pembangunan
5. Penyusunan kerangka dasar strategi pembangunan

Ibn Khaldun dikenal sebagai seorang cendekiawan muslim yang ahli di bidang politik, sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan tentu saja ahli di bidang syariah dan muamalah merupakan salah satu ilmuwan muslim yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pembangunan suatu bangsa (*Arif Hassan, 2000*).

Persoalan kemiskinan juga menjadi sorotan utama dalam kajian pembangunan ekonomi termasuk di kawasan pesisir pantai. Kemiskinan di kalangan nelayan menjadi persoalan serius dalam perekonomian di Indoneisa. Fenomena kemiskinan merupakan fenomena yang terkait dengan banyak aspek baik aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circles*) merupakan suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan di mana suatu Negara akan tetap miskin dan akan menghadapi banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. *Nurkse* menyatakan bahwa lingkaran kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menimbulkan hambatan pembangunan di masa yang akan datang. Fenomena lingkaran perangkap kemiskinan (*the vicious circles*) digambarkan sebagai berikut (*Todaro, 2000*):



Sumber : Meier and Baldwin, hal. 320

Gambar 2. Lingkaran Perangkap Kemiskinan (*the vicious circles*)

Kemiskinan timbul bisa karena faktor individual, kultural dan struktural. Persepsi individu tentang pentingnya upaya memperbaiki kualitas hidup melalui peningkatan etos bekerja dan etos belajar pada sebagian masyarakat Indonesia dan negara berkembang lainnya masih lemah. Sehingga produktivitas manusia Indonesia secara umum relatif masih rendah dibandingkan negara lain. Faktor inilah yang menjadi penyebab utama banyaknya jumlah orang miskin di Indonesia. Menanamkan etos kerja, efisiensi, produktivitas, kreativitas dan semangat berwiraswasta pada masyarakat Indonesia merupakan langkah strategis mengatasi kemiskinan yang kronis di Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam etos kerja secara individual merupakan bagian dari kesempurnaan hidup seorang muslim yang harus selalu ditumbuhkan. Sehingga bagi seorang muslim merupakan kewajiban baginya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam kehidupan ini. Dalam sejarah kehidupan Rosululloh SAW, para shahabat dan orang-orang sholeh ada banyak bukti empiric yang menunjukkan ketinggian semangat kerja dan berprestasi sehingga mampu menampilkan kinerja yang prima baik sebagai seorang pedagang, pemimpin Negara, ahli bidang ekonomi, ahli bidang ilmu falak, ahli bidang politik, ahli bidang ilmu eksakta, ahli bidang ilmu kedokteran, ahli bidang fikih,

ahli bidang tafsir dsb.

Namun persoalan kemiskinan juga bisa timbul karena faktor kultural masyarakat Indonesia dan beberapa negara muslim lainnya yang masih menganggap masalah kemiskinan sebagai '*takdir*' yang musti diterima dengan penuh kepasrahan tanpa diupayakan secara serius bagaimana mengatasi akar permasalahan kemiskinan yang sebenarnya. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat muslim yang tidak merasa '*malu*' dimasukkan dalam kategori orang miskin bahkan mereka ramai-ramai minta kepada aparat pemerintah dicantumkan sebagai masyarakat miskin untuk sekedar dapat menerima bantuan subsidi dari pemerintah yang nilainya tidak seberapa dibandingkan predikatnya sebagai orang miskin. Faktor kultural pada sebagian masyarakat menjadi penyebab kemiskinan sulit diatasi yaitu menyangkut persepsi dalam melihat perubahan dan kecenderungan yang terjadi dengan menggunakan nilai-nilai tradisional di tengah kancah persaingan global yang semakin tajam. Masih banyak dari masyarakat yang menempatkan aspek-aspek produktivitas dan efisiensi sebagai hal yang asing dan tidak perlu diperbincangkan sehingga mereka tetap sebagai bagian dari masyarakat yang statis di tengah dinamika kehidupan yang semakin kompleks.

Di sinilah pentingnya menyampaikan pesan moral Islam kepada umat Islam mengenai pentingnya membangun kekuatan ekonomi melalui semangat kerja dan kerjasama agar kualitas hidup dapat ditingkatkan. Ada kesalahan persepsi di kalangan umat Islam mengenai makna '*ibadah*' yang seringkali diartikan sebatas ibadah ritual secara mahdhoh seperti sholat, puasa, haji, membaca Al-Qur'an dsb. Sedangkan aktivitas kemanusiaan seperti bekerja sebagai seorang pedagang di pasar, kuli bangunan, petani di sawah, akuntan, dokter, konsultan, dosen, psikolog, pegawai negeri, anggota legislatif, pemimpin pemerintahan, arsitek dsb dianggap bukan wilayah yang berkaitan dengan '*ibadah*'. Kesalahan pemahaman agama menimbulkan kesalahan dalam mengambil sikap serta berpengaruh terhadap perilaku dan orientasi hidup yang dikembangkan. Padahal wilayah agama adalah menyangkut semua aspek kehidupan sehingga makna ibadah adalah menyangkut semua dimensi kehidupan sebagai bagian untuk mencari ridho Allah swt.

Kemiskinan juga timbul karena persoalan yang berkaitan dengan aspek struktural dimana peranan pemerintah sebagai '*representasi*' masyarakat diharapkan dapat menterjemahkan setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan aspirasi masyarakat luas. Namun dalam kenyataan justru seringkali terjadi sebaliknya bahwa kebijakan pemerintah banyak yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas tetapi lebih mementingkan kelompok pemilik modal (*kapitalis*) atau kroni-kroninya. Kasus-kasus pengelolaan hutan di Sumatera dan Kalimantan, pengelolaan tambang emas di Papua, pengelolaan minyak di Cepu dsb merupakan sebagian contoh kebijakan ekonomi pemerintah yang lebih memihak pada kepentingan kaum kapitalis dari pada kepentingan masyarakat luas. Termasuk juga bagaimana Indonesia yang mempunyai kawasan laut yang luas tetapi menghadapi kenyataan kemiskinan yang masif nelayan Indonesia. Ini merupakan persoalan yang harus diselesaikan dalam pembangunan ekonomi Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Untuk menjaga kredibilitas dan validitas hasil penelitian ini, maka disamping data diambil langsung dari obyek penelitian melalui survey di lapangan juga diambilkan dari sumber referensi yang dapat dipercaya (*credible*) baik dari buku-buku (*referensi*) yang diterbitkan secara internasional maupun terbitan nasional yang ada ISBN. Data-data diambil dari sumber yang kredibel seperti data dari dinas terkait seperti Bappeda, SKPD dan Dinas terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diperindag), Dinas Pertanian (Dipertan), dan juga dari IFS, BPS, BI dan Bappenas. Tempat penelitian secara teknis di lokasi pantai selatan DIY namun secara prosedural data dan informasi tentang lokasi penelitian dapat diakses melalui media online yang dapat diunggah secara mudah.

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode analisis yaitu Analisis Location Quotient (LQ), Analisis Shift-Share, Analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Analisis Shift-Share juga membandingkan perbedaan laju pertumbuhan berbagai sektor (industri) di daerah (kabupaten) dengan wilayah regional/nasional. Metode Shift-Share relatif lebih

spesifik dibandingkan metode LQ karena dapat menjelaskan penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis Shift-Share juga dapat untuk mengetahui proyeksi sektor ekonomi pada periode yang akan datang. Analisis Shift-Share bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik regional Bruto (PDRB). Analisis Shift-share dapat digunakan untuk mendeskripsikan trend agregat secara statistik, shift-share analisi mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang diperbandingkan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk shift-share diantaranya adalah PDRB disektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional ( $r_n$ ), laju pertumbuhan PDB disektor tertentu (i) ditingkat nasional ( $r_{in}$ ), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah. Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu dengan mengkaji keadaan perekonomian daerah pedesaan secara partisipatif (*participatory rural appraisal*) atau PRA yang merupakan sekumpulan teknik dan alat yang mendorong masyarakat pantai untuk turut serta meningkatkan dan menganalisa pengetahuannya mengenai hidup dan kondisi mereka sendiri agar mereka dapat membuat rencana dan tindakan. Pendekatan lain dalam analisis pemberdayaan ekonomi masyarakat partisipatif yaitu metode-metode belajar secara partisipatif (*participatory learning methods*) atau PALM yang menekankan pada proses pembelajaran partisipatif masyarakat pedesaan dalam menghadapi permasalahan dan tantangan ekonomi. Identifikasi permasalahan dan rumusan strategi dalam pemecahan masalah berdasarkan proses partisipasi masyarakat. Location Quotient (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu.  $LQ = (E_{ij}/E_j)/(E_{in}/E_n)$

Dimana,

$E_{ij}$  : Kesempatan kerja di sektor I di wilayah j

$E_j$  : Kesempatan kerja di wilayah j

$E_{in}$  : Kesempatan kerja di sektor I di negara n

$E_n$  : Kesempatan kerja di negara n

Interpretasi dari hasil perhitungan dengan formula tersebut adalah :

- a. Jika nilai  $LQ > 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah  $>$  tingkat spesialisasi nasional)
- b. Jika nilai  $LQ = 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah = tingkat spesialisasi nasional)
- c. Jika nilai  $LQ < 1$ , maka wilayah j untuk sektor I ada spesialisasi (Tingkat spesialisasi wilayah  $<$  tingkat spesialisasi nasional)

Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat.

Dalam analisis Typology Klassen dibagi menjadi 4 kategori yaitu daerah maju berkembang cepat, daerah berkembang cepat, daerah potensial dan daerah relatif tertinggal. Dalam analisis Typology Klassen dibagi menjadi 4 kategori yaitu :

- a. Daerah Maju Berkembang Cepat  
Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi  $\geq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi 1
- b. Daerah Berkembang Cepat  
Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi  $\geq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi 1
- c. Daerah Potensial  
Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi  $\geq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi 1
- d. Daerah Relatif Tertinggal  
Daerah yang memiliki ciri Kontribusi PDRB Kab/kota/Rerata Kontribusi PDRB propinsi  $\leq 1$  dan Rerata Pertumbuhan PDRB (kab/Kota)/Rerata PDRB Propinsi 1

## Analisis

Struktur ekonomi dan struktur sosial tiap kabupaten di DIY berbeda satu sama lain yang didasarkan pada *Typology* Klassen. Berdasarkan laju pertumbuhan PDRB dan kontribusi dalam pembentukan PDRB kabupaten terhadap PDRB provinsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Perkembangan Ekonomi Kabupaten/Kota Terhadap Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2011 sebagaimana dalam tabel 2 berikut :

Tabel 2. Perkembangan Ekonomi Daerah DIY berdasarkan *Typology* Klassen

<i>Kriteria</i>	<i>Daerah</i>
Daerah Maju Berkembang Cepat	Kota Yogyakarta
Daerah Berkembang Cepat	Kabupaten Bantul
Daerah Potensial	Kabupaten Sleman
Daerah Tertinggal	Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo

Sumber: DIY dalam angka 2007-2011 (diolah)

Dari hasil analisis di atas terlihat bahwa daerah yang sudah maju dan berkembang cepat adalah kota Yogyakarta, temuan ini tidak mengherankan karena kota Yogyakarta merupakan penggerak perekonomian DIY. Sedangkan kabupaten Bantul masuk dalam kategori daerah berkembang cepat, artinya memiliki potensi pengembangan yang cukup besar untuk menjadi daerah yang lebih maju. Kabupaten Sleman masuk dalam kategori daerah potensial yang memerlukan investasi dan strategi pembangunan yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Sedangkan kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo masuk dalam kategori daerah tertinggal dalam konteks pembangunan ekonomi DIY mengingat potensi ekonominya yang relatif rendah dan minimnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

*Location Quotient* (LQ) merupakan alat analisis untuk mengetahui ada tidaknya spesialisasi suatu wilayah untuk sektor (industri) tertentu.

$$LQ = (E_{ij}/E_j)/(E_{in}/E_n)$$

dimana,

$E_{ij}$  : Kesempatan kerja di sektor I di wilayah j

$E_j$  : Kesempatan kerja di wilayah j

$E_m$  : Kesempatan kerja di sektor I di negara n

$E_{ij}$  : Kesempatan kerja di negara n

Analisis LQ menunjukkan bahwa seluruh kota/kabupaten baik yang berada dalam kawasan andalan maupun kawasan bukan andalan, memiliki LQ yang lebih besar dari satu pada beberapa subsektor lapangan usaha. Artinya, semua kabupaten/kota memiliki subsektor unggulan dan penetapan kawasan andalan berdasarkan persyaratan sektor unggulan dapat dipandang tepat.

Tabel 3. Nilai Location Quotion (LQ) Perekonomian DIY

Sektor Ekonomi	Rerata Location Quotion (LQ)			
	Yogyakarta	Bantul	Kulonprogo	Sleman Gunungkidul
Pertanian	0.018521	0.33152	0.90252	1.18
Pertamb.& Pengga.	0.007141	0.36130	0.70952	1.57
Industri Pengol.	0.783961	1.21111	0.9690	1.81
List.,gas,air bersih	1.041430	0.74054	0.75710	1.46
Bangunan	0.825241	1.230541	1.19600	1.88
Perdgl., restr.&hotel	1.194140	0.940821	0.7360	1.70
Angkt.& Komuk.i	1.923540	0.690980	0.57540	1.67
Keu, Persw&Js Perh	1.505580	0.67068	1.11610	1.51
Jasa-jasa	1.226720	0.79104	1.03210	1.79

Sumber: DIY dalam angka 2007-2011 (diolah)

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing kabupaten/kota memiliki sub sektor unggulan tertentu yaitu pada sektor yang memiliki nilai LQ > 1. Kabupaten Sleman memiliki sektor unggulan pada sektor-sektor di Industri pengolahan, Bangunan, Perdagangan, restoran dan hotel, Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa. Hal ini bisa dilihat dari hasil analisis LQ yang nilainya > 1, sedangkan sektor lainnya seperti pertanian, pertambangan dan penggalian dan angkutan dan komunikasi nilainya < 1 sehingga bukan merupakan sektor unggulan. Aspek ekonomi yang perlu diperhatikan dari hasil analisis LQ tersebut yaitu pada sektor pertanian, karena selama ini sektor pertanian termasuk sektor yang menjadi kebanggaan masyarakat seperti salak pondoh dan agrowisata. Fenomena ini menjadi indikasi

bahwa terjadi alih fungsi lahan yang cukup signifikan untuk penggunaan non pertanian karena kebutuhan ekonomi yang cukup menjanjikan misalnya untuk perumahan (real estate), ruko dan pembangunan sarana bisnis. Sedangkan kondisi yang berkebalikan terjadi antara kota Yogyakarta dengan kabupaten Gunungkidul dan Bantul yang masing-masing memiliki keunggulan pada sektor-sektor tertentu. Kota Yogyakarta dan juga kabupaten Sleman memiliki keunggulan pada sektor ekonomi sekunder dan tersier sedangkan kabupaten Gunungkidul dan Bantul memiliki keunggulan pada sektor primer.

Analisis shift-share bertujuan untuk mengetahui kontribusi tiap-tiap subsektor terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis *Shift-share* dapat digunakan untuk mendeskripsikan *trend agregat* secara statistik, *shift-share analisis* mengklarifikasikan perubahan PDRB setiap saat dalam wilayah yang diperbandingkan dengan tiga kategori, komponen dalam membentuk *shift-share* diantaranya adalah PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah, laju pertumbuhan PDB tingkat nasional (rn), laju pertumbuhan PDB di sektor tertentu (i) di tingkat nasional (rin), dan laju pertumbuhan PDRB di sektor tertentu (i) tingkat wilayah (rij). Komponen perubahan secara nasional mempresentasikan komponen pembagian nasional untuk perhitungan dimana laju pertumbuhan regional yang telah mengalami perubahan diikuti perubahan secara tepat dalam tingkat nasional untuk semua sub sektor dalam tingkat nasional untuk semua sub sektor dalam periode penilaian. Jika pertumbuhan di tingkat regional berbeda dengan nasional (berupa positif atau negatif dalam pergeseran PDRB), secara total pergeseran terdiri dari pergeseran struktural juga pergeseran mengenai pembagian proporsional. Dampak perubahan PDRB dimana dalam perhitungan di tingkat regional berubah sesuai dengan tipe dari PDRB dalam sub sektor tertentu (termasuk cepat atau lambatnya laju pertumbuhan nasional). Pergeseran terdiri dari perbedaan dalam pergeseran juga pengetahuan tentang dampak regional dimana perhitungan PDRB regional berubah seiring dengan faktor lokasi di tiap regional. Berikut dijelaskan hasil perhitungan analisis shift-share sebagai berikut :

Tabel 4. Nilai Shift-Share Perekonomian DIY

Sektor Ekonomi	Nilai Shift-Share tahun 2011				
	Yogyakarta	Bantul	Kulonprogo	Sleman	Gunungkidul
Pertanian	41621,80911,76823,78830,212				
Pertamb. dan Penggalian	152,023801,8153,376				
Industri Pengolahan	30,9335,62013,83350,65720,032				
Listrik, gas & air bersih	3,231,746552,872910				
Bangunan	24,1926,8645,55342,82516,536				
Perdgt., restr.& hotel	101,8159,76823,467109,08736,903				
Angkt& Komunikasi	174,2244,86827,18858,94135,598				
Keu., Persw.& js Perh	-295,34-98,176-41,329-249,477-61,959				
Jasa-jasa	70,2633,20319,82567,96527,569				

Sumber: DIY dalam angka 2007-2011 (diolah)

Dari tabel hasil analisis di atas, terlihat pada tahun 2011 terjadi perbedaan karakteristik pembangunan ekonomi antar kabupaten/kota di DIY, artinya bahwa masing-masing daerah memiliki keunggulan dan keunikan ekonominya sendiri-sendiri. Disamping itu juga menunjukkan adanya fenomena pergeseran pembangunan antar sektoral yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan yang signifikan, demikian juga dapat dilihat kecenderungan perubahan karakter ekonomi antar sektor.

Di kota Yogyakarta terlihat bahwa keunggulan kompetitif mengalami penurunan terutama di sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa-jasa (akibat krisis Eropa dan Amerika). Dari hasil analisis *shift-share* pada tahun 2011 secara keseluruhan dengan melihat analisis *shift-share* pada PDRB mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2010, secara keseluruhan semua sektor terjadi peningkatan keunggulan kompetitif dibandingkan tahun 2010 pada PDRB dalam wilayah kota Yogyakarta. Sektor-sektor yang mengalami peningkatan keunggulan kompetitif adalah perdagangan, restoran dan hotel, angkutan dan komunikasi dan jasa-jasa. Sektor-sektor tersebut relatif stabil pengaruh keunggulan kompetitif dalam perekonomian di kota Yogyakarta. Perubahan *shift-share* dari tahun 2009 – 2011 mengalami fluktuasi secara total dan pada umumnya mengalami penurunan kinerja tahun 2011 dibandingkan dengan tahun 2009. Analisis *shift-share* tersebut juga

dapat menjadi bahan evaluasi terhadap proses perencanaan pembangunan di kota Yogyakarta yang mengalami perubahan karakteristik dari perekonomian sektor primer ke sektor jasa. Sementara untuk daerah lainnya menunjukkan kecenderungan yang agak berbeda seperti di kabupaten Bantul. Dari hasil analisis *shift-share* pada tahun 2011 secara keseluruhan dengan melihat analisis shift-share pada PDRB mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2010, tetapi secara keseluruhan semua sektor terjadi penurunan keunggulan kompetitif dibandingkan tahun 2010 pada PDRB dalam wilayah Kabupaten Bantul. Analisis di atas mengungkapkan bahwa pengaruh pertumbuhan propinsi (Nij) pada tahun 2011 yang paling besar adalah sektor pertanian di ikuti sektor perdagangan, restoran dan hotel masing-masing sebesar 46,195 dan 42,157. Hasil ini selaras dengan analisis Klasen Typology dan analisis struktur ekonomi kabupaten Bantul, karena memang secara obyektif kabupaten Bantul merupakan daerah yang subur dan potensial bagi pengembangan sektor pertanian dan peternakan.

Analisis pemberdayaan masyarakat nelayan di pesisir pantai selatan DIY menunjukkan kecenderungan yang terus membaik dimana hasil tangkapan dan nilai tambah produk perikanan terus menunjukkan kecenderungan meningkat. Kondisi ini tidak terlepas dari peran aktif masyarakat nelayan untuk meningkatkan ketrampilan dan jaringan kerjasama termasuk dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan ikan. Modernisasi peralatan tangkap ikan seperti kapal dan jaring serta peningkatan teknik pengelolaan hasil tangkapan serta pengolahan hasil tangkapan sehingga dapat laku di pasaran merupakan aktivitas yang secara riil dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan pesisir selatan DIY. Peningkatan hasil tangkapan ikan dan pendapatan nelayan juga didorong oleh meningkatnya kerjasama antar nelayan melalui organisasi kelompok nelayan untuk mengembangkan nilai ekonomi hasil tangkapan dan kesejahteraan keluarga nelayan. Selain membentuk kelompok nelayan tangkap juga terdapat kelompok usaha bersama (KUB) pengolah hasil tangkapan ikan dan pedagang ikan yang anggota para pedagang ikan sebagaimana produksi yang dihasilkan dari TPI Pandan Mino yang mencapai 375 kg/hari atau 11.200 kg/bulan dengan jenis komoditas tangkapan. Berikan

ditampilkan data hasil tangkapan ikan di TPI Pandan Minoi :

Tabel 5. Hasil Tangkapan Ikan Nelayan di TPI Pandan Mino, Bantul

Jenis Ikan	Jumlah (kg/tahun)
Bawal	13.692
Layut	9.108
Kakap	1.368
Tengiri	88
Hiu	1.156
Pari	3.200
Keting	8.284
Gatho	208
Tongkol	80.000
Ekor Kuning	728
Teri	6.024
Campur	7.944
Surung	156
Samanganti	3.357,2

Sumber: Profil Tempat Pelalangan Ikan (TPI) DIY, 2013

Tabel di atas menjelaskan bahwa komoditas yang dihasilkan adalah berbagai macam jenis ikan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan kemudian diolah menjadi ikan goreng, ikan asam manis dan olahan hasil tangkapan laut lainnya. Kebutuhan bahan baku ikan segar masih didatangkan dari luar pantai DIY. Jadi sebenarnya potensi pengembangan sektor perikanan DIY masih cukup besar baik kebutuhan bahan baku ikan untuk mendorong industri pengolahan ikan atau untuk memenuhi kebutuhan permintaan ikan segar yang jumlahnya terus meningkat. Sedangkan kelompok pedagang ikan juga memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar dalam meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan ikanikan segar yang langsung diolah di tempat. Potensi pengembangan sektor perikanan juga mendorong berkembangnya sektor pariwisata laut dan pantai karena adanya sentra penjualan hasil tangkapan ikan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan asing dan domestik untuk datang ke pantai disamping menikmati keindahan laut untuk menikmati hasil tangkapan ikan baik untuk dikonsumsi di tempat atau di bawa pulang seperti di Baron, Depok, Congot, Glagah,

Krakal dan Parangtritis. Perkembangan pariwisata pantai di DIY seiring dengan perkembangan sektor perikanan laut dan sekaligus juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian di atas dapat diperoleh beberapa kesimpulan yaitu :

1. Pengembangan sektor perikanan di DIY membutuhkan perencanaan dan pengembangan yang komprehensif dan integral dari semua *stakeholders* baik pemerintah, nelayan, masyarakat dan dunia usaha
2. Pengembangan sektor perikanan harus diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan melalui peningkatan hasil tangkapan dan nilai ekonomi hasil tangkapan ikan
3. Peningkatan hasil tangkapan ikan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas peralatan tangkap ikan baik melalui program modernisasi kapal dan peralatan jaring sehingga dapat menjangkau cakupan laut yang lebih jauh.
4. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan nilai ekonomi hasil tangkapan dengan teknologi penyimpanan dan pengolahan ikan menjadi produk-produk yang diminati pasar
5. Pengembangan sektor perikanan yang terpadu dengan pengembangan sektor pariwisata dan pertanian lahan pantai untuk memberi peluang ekonomi lebih banyak kepada nelayan
6. Perlu dibuat *roadmap* pengembangan sektor perikanan dalam jangka menengah dan jangka panjang menyongsong pembangunan bandara internasional di Kulonprogo agar dapat memberikan peran lebih besar bagi sektor perikanan dalam roda ekonomi di DIY

## **Daftar Pustaka**

- Ahmad Khursid. 1976. *Studies in Islamic Economics*, Jeddah, International Centre for Research in Islamic Economics.
- Arif Hassan and Khaliq Ahmad. 2000. "Perception of Justice and Fairness in Allocation of Organizational Resources Examining Cultural Differences", *IJUM Journal*, Volume 8, No. 1, p. 3
- Arsyad Anwar. 1985. *Prospek dan Permasalahan Ekonomi Indonesia 1985-1986*, edisi pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Sinar Harapan, Jakarta
- Basri Faisal. 2013. *Tinjauan Pembangunan Maritim Indonesia "Menggapai Negara Maritim,"* Edisi ke-2.
- Boediono. 1979. *Econometric Models of The Indonesian Economy for Short Run Policy Analysis*, Disertation Ph.D, University of Pennsylvania
- Chapra Muhammad Umer. 2000. *The Future of Economics An Islamic Perspective*, The Islamic Foundation, UK, p. 1
- Dinc Mustafa. 2001. *Regional and Local Economic Analysis Tools*, The World Bank, Washington DC,
- Firman, T.. 1997. *Land Conversion and Urban Development in The Northern Region of West Java*, Indonesia, *Urban Studies*, 34 (7): 1027 – 1046
- Hasanuzzaman. 1981. *The Economic Functions of The Early Islamic State*, Karachi, International Islamic Publisher,
- Hill, Hall. 1996. *The Indonesian Economic since 1966 Southeast Asia's Emerging Giant*, Cambridge University Press, London
- Imamudin Yuliadi. 2001. *Analisis Makroekonomi Indonesia Pendekatan IS-LM*, tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Kustiawan, A.. 1997. *Konversi Laban Pertanian Pantai Utara Pulau Jawa*, Prisma No. 1 tahun XXVII, LP3ES, Jakarta
- Maddala, GS.. 2001. *Introduction to Econometrics*, second edition, Maxwell Macmillan International Publishing Company, New York
- Mankiw. 2000. G N, *Macroeconomics*, Worth Publisher Co, New York,

- M. Nasir. 1999. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nopirin. 1983. *A Synthesis of Monetary and Keynesian Approach to The Balance of Payments The Indonesian Case 1970-1979*, Ph.D dissertation, Washington State University, 1983, Unpublished
- Peursen van CA. 1993.. *Susunan Ilmu Pengetahuan Sebuah Pengantar Filsafat Ilmu*, , PT Gramedia, Jakarta
- Pindyck, Robert S and Rubinfeld, Daniel L., 1991. *Econometric Model and Economic Forecast*, International edition, McGraw-Hill Inc., third edition
- Sadoulet Elisabeth and Alain de Janvry. 1995. *Quantitative Development Policy Analysis*, The John Hopkins University Press, Baltimore,
- Soekartawi. 1994. "Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian Indonesia", *Jurnal Studi Indonesia*, 4 <http://pk.ut.ac.id/jsi/4soeka.htm>(2 April 2006)
- Sritua Arif. 1990. *Dari Prestasi Pembangunan sampai Ekonomi Politik, kumpulan Karangan*, Penerbit Universitas Indonesia
- Siddiqi Muhammad Nejatullah. 1976. *Muslim Economic Thinking A Survey of Contemporary Literature*,
- Supono Prasetyo. 2003. *Analisis Shift-Share Perkembangan dan Penerapan*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, FE-UGM, Yogyakarta, Tawang Alun, 1992, *Analisa Ekonomi Utang Luar Negeri*, LP3ES, Jakarta,
- Thomas, R Leighton. 1985. *Introductory Econometrics Theory and Application*, first edition, British Library Catalog in Publishing Data, Printed in Singapore
- Turnovsky, Stephen J. 1981. *Macroeconomic Analysis and Stabilization Policy*, Cambridge University Press, USA
- Todaro Michael P, Economic Development. 2000. Pearson Education Ltd,
- Tulus Tambunan. 2001. *Perdagangan Internasional dan Neraca Pembayaran*, LP3ES, Jakarta
- West and Cho. 1995. "The Predictive Ability of Several Models of Exchange Rate Volatility", *Journal of Econometrics*, 69, , pp. 367-391

Wihana Kirana Jaya. 1990. "Seleksi Model Permintaan Uang di Indonesia 1973-1983, *Journal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, No. 2 tahun V

Zhaoyong Zhang. 1999. "China's Exchange Rate Reform and Its Impact on The Balance of Trade and Domestic Inflation", *Asia Pacific Journal of Economics and Business*, vol. 3 No. 2, December